KAPITALISME INTERNASIONAL, LIBERALISASI EKONOMI, OLIGARKI, DAN PERAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DI ERA REFORMASI

Naifatul Zahra[1], Tasya Citra Hasanah[2], Amanda Bynes[3], Sabrina Azzahra[4] , Etmi Hardi[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : naifatulzahraa@student.unp.ac.id[1], tasyacitra@student.unp.ac.id[2], amandabynes@student.unp.ac.id[3], sabrinaazzahra@student.unp.ac.id[4], etmihardi@fis.unp.ac.id[5]

ABSTRAK

Evolusi kapitalisme global dan neoliberalisme, dinamika liberalisasi ekonomi selama era reformasi, adaptasi oligarki dalam institusi demokratis, dan peran sektor swasta dalam pembangunan merupakan empat dimensi utama yang ingin dianalisis secara menyeluruh oleh artikel ini. Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif dan metode analisis deskriptif berbasis literatur yang didasarkan pada ekonomi politik kritis. Hal ini telah mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi Indonesia dalam konteks kapitalisme neoliberal global, khususnya selama periode reformasi 1998. Menurut studi ini, liberalisasi ekonomi sejak 1998 telah menghasilkan kenaikan rata-rata tahunan sebesar 5–6%, tetapi juga mengungkapkan bahwa ketimpangan telah meningkat (koefisien Gini meningkat dari 0,31 menjadi 0,41). Alih-alih melemahkan oligarki, demokratisasi mendorong adaptasi melalui kontrol media dan pendanaan politik. Meskipun sektor swasta menyumbang 80–85% dari PDB, pendapatannya tidak dibagikan secara merata, dan perusahaan kecil dan menengah, khususnya, hanya mampu memperoleh 20% dari pinjaman bank. Disimpulkan bahwa integrasi Indonesia ke dalam kapitalisme global memerlukan penguatan institusi anti-korupsi, kebijakan redistribusi progresif, dan regulasi yang mendorong pembangunan inklusif.

Kata Kunci : *Kapitalisme Internasional, Neoliberalisme, Oligarki, Liberalisasi Ekonomi, Era Reformasi Indonesia*

ABSTRACT

The evolution of global capitalism and neoliberalism, the dynamics of economic liberalization during the reform era, the adaptation of oligarchs within democratic institutions, and the role of the private sector in development are the four main dimensions that this article seeks to comprehensively analyze. This article uses a qualitative methodology and descriptive literature-based analysis methods grounded in critical political economy. This has influenced Indonesia's political and economic development within the context of global neoliberal capitalism, particularly during the 1998 reform period. According to this study, economic liberalization since 1998 has resulted in an average annual increase of 5–6%, but also reveals that inequality has increased (the Gini coefficient increased from 0.31 to 0.41). Rather than weakening oligarchs, democratization has encouraged adaptation through media control and political funding. Although the private sector contributes 80–85% of GDP, its revenues are not distributed equally, and small and medium-sized enterprises, in particular, are only able to obtain 20% of bank loans. The conclusion is that Indonesia's integration into global capitalism requires strengthening anti-corruption institutions, progressive redistribution policies, and regulations that promote inclusive development.

Keywords : *International Capitalism, Neoliberalism, Oligarchy, Economic Liberalization, Indonesian Reform Era*

PENDAHULUAN

Tata dunia telah didominsi oleh kapitalisme multinasional selama beberapa abad. Bahkan pada masa sekarang, sistem ini masih mengalami penyesuaian yang signifikan. Dari sudut pandang ekonomi politik internasional, kapitalisme dipandang sebagaii baik sistem ekonomi maupun jenis kekuatan politik yang memengaruhi bagaimana pemerintah, kelas sosial, dan aktor lain dalam sistem internasional berinteraksi (Caporaso & Levine, 1992). sistem ini telah mengalami kapitalisme industri pada abad ke-19, kapitalisme negara kesejahteraan setelah Perang Dunia II, dan kapitalisme neoliberalisme sejak tahun 1980-an, dimulai dengan era merkantilisme awal.

Indonesia tidak bisa terisolasi dari pengaruh kapitalisme global karena merupakan negara berkembang dengan sejarah panjang penjajahan. Setelah kemerdekaan, Indonesia mencoba berbagai model Pembangunan ekonomi, termasuk ekonomi yang berorientasi pertumbuhanpada Orde Baru, dan pergeseran menuju demokrasi serta ekonomi pasar pada era reformasi. Krisis keuangan Asia 1997-1998 adalah peristiwa penting yang memaksa Indonesia melakukan reformasi structural yang luas di semua bidang ekonomi dan politik (Vedi R. Hadiz & Richard Robison, 2013). Pemerintahan sistem baru, yang telah berkuasa selama 32 tahun, kehilangan legitimasi akibat bencana ini, yang juga menghancurkan sistem ekonomi..

Bagi Indonesia, era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai perubahan paradigma yang dramatis. Partisipasi publik yang lebih luas menjadi mungkin berkat demokratisasi, tetapi pada saat yang sama, kekuatan oligarki yang sebelumnya tersembunyi di balik otoritarianisme Orde Baru mungkin telah meningkat. Dampak kapitalisme global terhadap struktur ekonnomi Indonesia semakin diperkuat oleh liberalisasi ekonomi yang dipelopori oleh *Internasional Monetary Fund* dan lembaga keuangan Internasional (Jeffrey A. Winters, 2013). Hubungan yang kompleks ini menciptakan paradoks pembangunan: disatu sisi, kemajuan ekonomi yang luar biasa telah dicapai, tetapi di sisi lain, korupsi yang terus menerus dan ketimpangan yang meningkat masih ada.

Para cendikiawan telah melakukan banyak penelitian tentang hubunga antara kapitalisme global dan transisi Indonesia, tetapi sebagian besar penelitian tersebut terfokus pada satu komponen, apakah itu sebuah institusi, polotik, atau ekonomi. Evolusi kapitalisme internasional dan neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi liberal selama era reformasi, dinamika oligarki dalam konteks demokratisasi, dan peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi adalah empat dimensi yang artikel ini bertujuan untuk mengintegrasikan analisanya secara menyeluruh. Diharapkan pendekatan integratif ini akan menawarkan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana Indonesia modern dibentuk oleh kapitalisme global..

Sejalan dengan konteks ini, pertanyaan penelitian berikut dikembangkan dalam artikel ini: (1) bagaimana neoliberalisme dan kapitalisme global berkembang, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia? (2) bagaimana dinamika dan efek liberalisasi ekonomi berubah selama era reformasi? (3) Bagaimana sistem demokrasi Indonesia mengakomodasi pola oligarki? dan (4) Bagaimana sektor swasta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan apa arti hal ini bagi pembangunan inklusif?

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi literatur analitis-deskriptif (library research). Pendekatan ekonomi politik kritis, yang mengintegrasikan analisis

ekonomi, berfungsi sebagai kerangka teori utama. Pendekatan ini mencakup unsur kekuasaan dan sistem sosial-politik (Caporaso & Levine, 1992). metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti mengandung hubungan yang kompleks antara fakktoor institusional, politik, dan ekonomi yang tidak mungkin dipelajarin secara terpisah.

Ada dua jenis sumber data: (1) sumber primer, yang mencakup laporan resmi dari organisasi internasional (IMF, Bank Dunia, UNCTAD), data statistik dari pemerintah Indonesia (BPS, BKPM, Bappenas), dan dokumen kebijakan; dan (2) sumber sekunder, yang mencakup buku akademik, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian relevan dari peneliti terkenal di bidang ekonomi politik Indonesia, seperti (Harvey, 2020), (Jeffrey A. Winters, 2013),(Basri & Hill, 2011), dan lainnya. Materi yang digunakan mencakup tahun 2000-2002, namun beberapa karya fundamental yang lebih lama dengan nilai konseptual masih disertakan.

Analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, penyelidikan teoretis untuk mengembangkan kerangka kerja analisis neoliberalisme dan kapitalisme global. Kedua adalah studi historis-komparatif tentang transisi politik dan ekonomi Indonesia dari masa Orde Baru ke periode Reformasi. Ketiga, studi tematis tentang topik tertentu, seperti peran sektor swasta, oligarki, dan liberalisasi ekonomi. Keempat, sintesis yang menggabungkan temuan dari ketiga topik tersebut menjadi sebuah cerita yang kohesif. Dengan menggunakan data statistik resmi sebagai dasar klaim empiris dan triangulasi sumber yaitu, memverifikasi hasil dari beberapa sumber independen validitas analisis tetap terjaga..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evolusi Kapitalisme Internasional dan Neoliberalisme

Sejak kemunculannya sebagai sistem ekonomi-politik, kapitalisme telah mengalami evolusi yang panjang. Dalam Das Kapital (1867), Karl Marx menggambarkan kapitalisme sebagai sistem produksi yang menggunakan eksploitasi tenaga kerja untuk menghasilkan nilai lebih. Tetapi kapitalisme telah berkembang jauh melebihi rancangan awalnya. Menurut teori sistem-dunia Immanuel Wallerstein, kapitalisme selalu bersifat intrinsik global, dengan dunia terbagi menjadi negara inti, semi-perifer, dan perifer yang saling terhubung melalui rantai komoditas internasional (Wallerstein, 2004). Indonesia menempati posisi semi-perifer dalam struktur ini, menyediakan tenaga kerja dan komoditas mentah yang murah.

Setelah perang dunia ke II, kappitalisme mengalami periode stabilisasi berkat sistem Bretton Woods, yang menciptakan sistem moneter global berbasis dolar. Kapitalisme neoliberal muncul sebagai akibat dari runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971 dan memperoleh perhatian pada tahun 1980-an di bawah pengaruh Thatcherisme dan Reaganisme (Harvey, 2020). Neoliberalisme yang dikenal sebagai Washington Consensus mencakup paket kebijakan yang dipromosikan oleh IMF dan Bank Dunia kepada negara berkembang, meliputi liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, deregulasi pasar keuangan, pengurangan subsidi, dan disiplin fiskal ketat (Ferri, 2003)

David (Harvey, 2020) dan (Harvey, 2015) berargumen bahwa neoliberalisme pada hakikatnya adalah sebuah proyek restorasi kekuasaan kelas elite. Melalui kebijakan liberalisasi dan privatisasi, kapital mendapatkan akses ke sumber-sumber akumulasi baru yang sebelumnya diproteksi oleh negara—proses yang (Harvey, 2020) sebut sebagai 'accumulation by dispossession'. Globalisasi yang meningkat sejak tahun 1990-an secara bertahap telah mengintegrasikan ekonomi negara ke dalam jaringan produksi dan keuangan gloobal melalui

rantai nilai global yang membangun pembagian kerja internasional yang baru (Gereffi, 2018). krisis keuangan keuangan asia 19997-1998 dan krisis keuangan global 2008 tidak hanya mengungkap kerentanan mendasar dari kapitalisme yang terfinalisasi, tetapi juga memicu diskusi penting mengenai peran negara dalam regulasi sektor keuangan dan pengawasan pasar (Stiglitz, 2010)

Perkembangan Ekonomi Liberal di Era Reformasi Indonesia

Era Reformasi yang dimulai pada 1998 membawa perubahan paradigmatik dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Tekanan dari IMF sebagai syarat bailout pasca krisis 1998 memaksa Indonesia mengadopsi paket kebijakan structural adjustment yang sangat komprehensif. Letter of Intent yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan IMF mensyaratkan serangkaian reformasi sejalan dengan preskripsi Washington Consensus: liberalisasi impor, penghapusan monopoli, privatisasi BUMN, pengurangan subsidi, serta penguatan independensi bank sentral (Basri & Rahardja, 2011). Kondisionalitas ini secara fundamental mengubah lanskap kebijakan ekonomi Indonesia.

Setelah reformasi, ketika Indonesia menjadi lebih terintegrasi ke dalam ekonomi global, liberalisasi perdagangan meningka. Beberapa perjanjian perdagangan bebas ditanda tangani, seperti (ASEAN) China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asean Free Trade Area (AFTA). Penurunan tarif impor secara signifikan membuka pasar domestik terhadap persaingan produk asing, memberikan tekanan bagi industri manufaktur dalam negeri sekaligus menekan inflasi (Patunru & Rahardja, 2015) . Pelaksanaan otonomi daerah sessuai dengan Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tahun 1999 memiliki efek limpahan ekonomi yang penting, termasuk desentralisasi fiscal yang memberikan lebih banyak kewenangan terhadap pemerintah daerah, akan tetapi pada saat yang sama, hal ini juga menyebabkan adanya fragmentasi regulasi (Firman, 2009).

Selama periode reformasi, faktor yang paling signifikan mempengaruhi perubahan ekonomi adalah deregulasi sektor keuangan. Sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab dibangun berdasarkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penguatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan reformasi perbankan pasca krisis 1998. menjadi fondasi sistem keuangan yang lebih prudent. Sektor perbankan mengalami konsolidasi besar-besaran dari lebih dari 200 bank sebelum krisis, menyusut melalui likuidasi, merger, dan akuisisi dengan regulasi permodalan yang lebih ketat sesuai standar Basel (Kovanen dkk., 2001). Namun liberalisasi investasi portofolio yang memungkinkan arus modal asing bergerak bebas tetap menciptakan kerentanan terhadap sudden capital outflows (Warjiyo & Juhro, 2019)

Sejak reformasi, perekonomian Indonesia umumnya tumbuh dengan cara yang bermanfaat. Ekonomi Indonesia pulih secara bertahap dari resesi berat sebesar -13,1% pada tahun 1998, mencatatkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 5-6% dari tahun 2000-an hingga 2010-an, ledakan komoditas pada tahun 2000-an, khususnya pada batu bara, minyak sawit, dan mineral, menyebabkan peningkatan pendapatan yang signifikan (Basri & Hill, 2011). Namun, jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi yang luar biasa, kesetaraan masih kurang. Koefisien gini indonesia yang sekiar 0,31 pada tahun 2000, meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2014, menunjukkan meningkatnya ketidaksetaraan (Piketty dkk., 2014) bahwa tingkat pengembalian modal cenderung melampaui pertumbuhan ekonomi sehingga kekayaan terkonsentrasi; di Indonesia, kelompok 1% teratas menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional (Yusuf dkk., 2014).

Tabel 1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Indonesia Era Reformasi (2000-2020)

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)	Koefisien Gini	FDI (miliar USD)
2000	4,9	0,31	−4,6
2005	5,7	0,34	8,3
2010	6,2	0,38	13,8
2014	5,0	0,41	25,1
2018	5,2	0,39	20,6
2020	−2,1	0,38	18,0

Sumber: BPS (2022); World Bank (2020)

Kebijakan Politik dan Dinamika Oligarki dalam Era Reformasi

Upaya demokratisasi paling penting dalam sejarah Indonesia dimulai dengan upayademokratisasi paling penting dalan sejarah Indonesia dimulai dengan jatuhnya suharto pada mei 1998, setelah pemilihan umum multiparti pertama sejak orde baru pada 1999 ada empat amandemen konstitusi (1999-2002) yang secara signifikan mengubah struktur polotik. Presiden dipilih langsung, otonomi daerah diperkuat, TNI dan Polri dihapus dari jatah kursi parlemen, dan Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi (Aspinall & Fealy, 2010). Perubahan kelembagaan ini secara formal menandai Indonesia sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia.

Namun demokratisasi tidak berjalan dalam ruang hampa.(Jeffrey A. Winters, 2013)) berargumen bahwa transisi demokratik di Indonesia tidak serta-merta mengikis kekuasaan kaum oligarki. Para oligarki—individu-individu yang menggunakan kekayaan material untuk mempertahankan posisi dominan—justru berhasil beradaptasi dengan mekanisme demokrasi. Mereka memiliki atau mengendalikan media, membiayai kampanye pparai dan kandida, serta mengekploitasi jaringan koneksi politik untuk mengamankan kepentingan ekonomi (Lindsey, 2018). (Hadiz & Robison, 2004) yang menyatakan bahwa lapisan sosial yang terbentuk selama era orde baru tidak hilang dengan runtuhnya pemerintahan tetapi mereorganisasi diri mereka dalam konteks politik demokratis yang baru.

Sarana utama integrasi oligarkis adalah pendanaan politik. Karna biaya pemilihan yang sangat tinggi dalam pemilihan langsung, para kandidat didorong untuk mendapatkan dukungan dari organisasi korporasi. Setelah terpilih, para politisi melindungi kepentingan para donor melalui kebijakan yang menguntungkan, kontrak pemerintah, akses ke sumber daya alam, atau perlindungan dari penegakan hukum. Hubungan transaksional ini menghasilkan kewajiban timbal balik (Mietzner, 2014). Kepemilikan media oleh konglomerat bisnis yang aktif berpolitik menjadi fenomena mencolok dalam lanskap oligarki Indonesia, menggunakan kendali atas jaringan televisi nasional dan portal berita sebagai instrumen politik yang powerful (Lim, t.t.)

Desntralisasi pasca reformasi telah menghasilkan arena politik baru yang bersifat oligarkis di tingkat daerah. Kemampuan walikota dan bupati untuk memberikan izin untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan telah menjadi sumber pendapatan dan pengaruh yang utama (Aspinall & Sukmajati, 2018). Fenomena "pilkada transaksional", di mana politikus yang didukung oleh jaringan perusahaan lokal mendominasi dan, setelah terpilih, sering membuat konsesi kepada para pendukungnya, merupakan tanda terbentuknya oligarki lokal (Buehler, 2016). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2002, yang merupakan pencapaian reformasi besar. Namun, amandemen Undang-Undang KPK tahun 2019, yang melemahkan

independensi institusi ini, menunjukkan seberapa gigih jaringan korup yang sudah mapan menentang (Butt, 2011)

Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dalam kerangka ekonomi pasar, sektor swasta memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kontribusi sektor swasta terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai sekitar 80–85%, menjadikannya pilar utama ekonomi nasional. Sekitar 25–30% dari PDB berasal dari investasi swasta, sementara investasi pemerintah hanya mencapai 5–8% (BPS, 2022Pertumbuhan sektor swasta, termasuk pengembangan ekonomi digital yang telah melahirkan unicorn teknologi seperti Goto, Bukalapak, dan Tokopedia, merupakan faktor kunci dalam transisi Indonesia dari ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi yang lebih diversifikasi (Hastiadi, 2016).

Dominasi organisasi konglomerat besar yang secara bersamaan mengendalikan sejumlah industri, termasuk perbankan, real estat, media, manufaktur, pertambangan, dan perkebunan, adalah salah satu aspek unik dari ekonomi Indonesia. Konsentrasi kekuatan ekonomi ini menghasilkan perilaku kartel, hambatan bagi masuknya pesaing baru, dan pengaruh yang tidak proporsional terhadap kebijakan publik (Eklöf, 1999). Akar masalah ini tertanam dalam sejarah: konglomerat berkembang sepanjang era Orde Baru akibat hubungan dekat dengan Suharto, yang memungkinkan mereka memperoleh lisensi monopoli, pembiayaan bersubsidi, dan fasilitas khusus. Bahkan jika sejumlah monopoli formal dihapus setelah 1998, konglomerat yang sudah mapan terus menikmati keuntungan besar dari dominasi pasar yang telah mereka bangun dan akumulasi keunggulan kompetitif mereka (Warjiyo & Juhro, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di sisi lain, kini merupakan dasar dari penyerapan lapangan kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan memberikan lebih dari 60% PDB, namun anehnya hanya memperoleh 20% dari seluruh kredit bank. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang serius dalam ketersediaan modal (Kemenkop UKM, 2021). Hambatan terbesar yang dihadapi UMKM adalah persaingan dari impor, terutama dari Tiongkok, yang menimbulkan banyak tekanan pada produsen berskala kecil di industri elektronik, tekstil, dan alas kaki (Patunru & Rahardja, 2015)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat di pengaruhi oleh investsi asing langsung (FDI), terutama dalam bidang transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi ke dalam rantai nilai internasional. Setelah sempat kehilangan daya tarik relatif dibandingkan Vietnam dan Thailand pada awal era Reformasi, FDI kembali meningkat signifikan sejak 2010 seiring membaiknya iklim investasi (Narjoko,2015.). Perusahaan multinasional sering memprioritaskan ekstraksi sumber daya dari pada mengembangkan kemampuan industri lokal yang berkelanjutan, dan strategi transfer pricinng mereka menurunkan pendapatan fiskal negara. Namun manfaat dari FDI teerhadap pembangunan tidak bersifat otomatis; perusahaan multinasional seringkali lebih berorientasi pada pengerukan sumber daya daripada membangun kapabilitas industri lokal yang berkelanjutan, dan praktik transfer pricing oleh perusahaan multinasional mengurangi penerimaan fiskal negara (United Nations Conference on Trade and Development, 2018)

Manfaat FDI terhadap pembangunan juga tidak selalu terjamin. Privatisasi bumn merupakan salah satu topik yang kontroversial itu sendiri. Diskusi nasional mengenai kedaulatan ekonomi dipicu oleh pprogram privatisasi yang menjadi syarat dalam paket penyelamatan IMF setelah 1998, terutama indosat dijual kepada Temasek Holdings dari Singapura pada tahun 2002. Kekhawatiran tentang dominasi asing di sektor strategis mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam kebijakan privatisasi. Namun, tren terkini menunjukkan ayunan kebijakan antara

liberalisasi dan statistisme, dengan kecenderungan untuk memperkuat BUMN sebagai instrumen pembangunan, khususnya dalam proyek infrastruktur skala besar (World Bank, 2020).

KESIMPULAN

Ada empat kesimpulan utama yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan. Pertama, liberalisasi perdagangan dan keuangan, kondisi IMF, investasi asing langsung, dan integrasi ke rangtai nilai gloal hanyalah beberapa cara di mana kapitalisme internasionall selama periode neoliberalisme telah sangat mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Dengan semua manfaat dan bahayanya, Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global. Indonesia telah semakin terintegrasi dalam sistem kapitalisme global dengan segala peluang dan risikonya.

Kedua, liberalisasi ekonomi era reformasi menghasilakn pertumbuhan yang signifikan (rata-rata 5-6% pertahun), tetapi tidak disukung oleh distribusi yang memadai. Koefisien gini, yang naik dari 0.31 menjadi 0,41 menunjukkan bahwasanya mereka yang sudah memiliki akses ke sumer daya dan koneksi biasanya tanpa adanya keuntungan dari deregulasi tanpa adanya langkah distribusi yang kuat.

Ketiga, demokratisasi tidak secara otomatis mengikis kekuasaan oligarki. Para oligarki berhasil beradaptasi dengan mekanisme demokrasi melalui pembiayaan politik, kepemilikan media, dan pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan. Korupsi yang tersentralisasi di era Orde Baru bertransformasi menjadi korupsi yang terdistribusi di era Reformasi—dalam beberapa aspek menjadi lebih sulit diberantas karena sifatnya yang terdesentralisasi.

Keempat, dengan kontribusi PDB sebesar 80-85%, sektor swasta muncul sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi masih memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dominasi konglomerat, akses UMKM yang terbatas terhadap pembiayaan (hanya 20% kredit bank), dan kemungkinan penyalahgunaan praktik investassi asing menunjukkan bahwa peranan sektor wasta perlu diawasi dengan aturan yang ketat dan pemerinttah yang efisien (Putri Sandrina Sitompul dkk., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Fealy, G. (Ed.). (2010). *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in honour of Harold Crouch* (1st ed.). ANU Press. https://doi.org/10.22459/SNOL.08.2010

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Ed.). (2018). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press Pte Ltd. https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2

Basri, M. C., & Hill, H. (2011). Indonesian Growth Dynamics: Indonesian Growth Dynamics. *Asian Economic Policy Review*, *6*(1), 90–107. https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2011.01184.x

Basri, M. C., & Rahardja, S. (2011). Should Indonesia Say Goodbye to Its Strategy of Facilitating Exports? Dalam M. Haddad & B. Shepherd, *Managing Openness* (hlm. 217–231). The World Bank. https://doi.org/10.1596/9780821386316_CH17

Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia* (1 ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316417843

Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in indonesia: An obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *47*(3), 381–394. https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051

Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). *Theories of Political Economy* (1 ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511840197

Eklöf, S. (1999). *Indonesian politics in crisis: The long fall of Suharto 1996-98* (1. Aufl). NIAS Publishing.

Ferri, G. (2003). Joseph E. Stiglitz (2002) *Globalization and Its Discontents*. *Economic Notes*, *32*(1), 123–142. https://doi.org/10.1046/j.0391-5026.2003.00107.x

Firman, T. (2009). DECENTRALIZATION REFORM AND LOCAL-GOVERNMENT PROLIFERATION IN INDONESIA: TOWARDS A FRAGMENTATION OF REGIONAL DEVELOPMENT. *Review of Urban & Regional Development Studies*, *21*(2–3), 143–157. https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.2010.00165.x

Gereffi, G. (2018). *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism* (1 ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108559423

Hadiz, V., & Robison, R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia* (0 ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203401453

Harvey, D. (2015). *Seventeen contradictions and the end of capitalism* (Paperback ed). Profile Books.

Harvey, D. (2020). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199283262.001.0001

Jeffrey A. Winters. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11. https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099

Kovanen, A., AKovanen@imf.org, Frécaut, O., OFrécaut@imf.org, Baldwin, B. E., BBaldwin@imf.org, Enoch, C., & CEnoch@imf.org. (2001). Indonesia: Anatomy of a Banking Crisis. *IMF Working Papers*, *01*(52), 1. https://doi.org/10.5089/9781451847253.001

Lim, M. (t.t.). *MEDIA CONCENTRATION IN INDONESIA*.

Lindsey, T. (with Butt, S.). (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press USA - OSO.

Mietzner, M. (2014). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press Pte Ltd. https://doi.org/10.2307/j.ctv1nthsj

Narjoko, D. A. (t.t.). *Foreign Direct Investment, Agglomeration, and Production Networks in Indonesian Manufacturing*.

Patunru, A. A., & Rahardja, S. (t.t.). *Trade Protectionism in Indonesia: Bad Times and Bad Policy*.

Piketty, T., Goldhammer, A., & Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. The Belknap Press of Harvard University Press.

Putri Sandrina Sitompul, Maya Martiza Sari, Cecillia Miranda Br Lumban Gaol, & Lokot Muda Harahap. (2025). Transformasi Digital UMKM Indonesia: Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, *2*(2), 09–18. https://doi.org/10.61132/jumbidter.v2i2.487

Stiglitz, J. E. (2010). *Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy* (First edition). W. W. Norton & Company.

United Nations Conference on Trade and Development. (2018). *World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies*. UN. https://doi.org/10.18356/ebb78749-en

Vedi R. Hadiz & Richard Robison. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the

Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, (96), 35. https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033

Wallerstein, I. M. (2004). *World-systems analysis: An introduction*. Duke University Press.

Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2019). *Central bank policy: Theory and practice* (First edition). Emerald Publishing.

Yusuf, A. A., Sumner, A., & Rum, I. A. (2014). Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993–2013. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *50*(2), 243–254. https://doi.org/10.1080/00074918.2014.939937